



## BAB I

# PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 5 daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada disisi utara. Wilayah Kabupaten Sleman membentang dari Sungai Opak pada sisi timur sampai Sungai Progo pada sisi barat dan perbatasan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul pada sisi selatan, dan pada sisi utara sampai dengan lereng Gunung Merapi yang termasuk 10 besar gunung teraktif di dunia berketinggian 2.968 meter. Dengan posisi tersebut menjadikan Kabupaten Sleman sebagai wilayah hulu dari Propinsi DIY.

Pengembangan Wilayah Kabupaten Sleman sebagai bagian integral dari Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat terlepas dari kawasan-kawasan bawahan seperti Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat, pengembangan pembangunan Kabupaten Sleman lebih diarahkan sebagai pusat pendidikan, lumbung pangan DIY, pengembangan kebudayaan sebagai pendukung kepariwisataan DIY, sentra industri kecil dan menengah, agro industri dan industri jasa.

Dengan *comparative advantage* yang dimiliki Kabupaten Sleman, menjadikan Sleman sebagai alternatif skala nasional untuk tujuan investasi baik dalam hal pendidikan maupun bisnis bagi masyarakat luar daerah. Hal ini berpengaruh pada demografi Kabupaten Sleman karena banyaknya pendatang dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Dalam perkembangannya, Kabupaten Sleman dapat diibaratkan sebagai miniatur Indonesia. Walaupun demikian kehidupan masyarakat Sleman baik penduduk asli maupun pendatang dapat berinteraksi dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kultur Jogja tanpa meninggalkan kultur budaya masing-masing etnik.

### **A. KONDISI KABUPATEN SLEMAN**

#### **1. Letak Wilayah Geografis**

Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara 107° 15' 03" dan 100° 29' 30" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 03" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang



dan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa tengah; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Luas Wilayah

Kabupaten Sleman memiliki wilayah seluas adalah 57.482 Ha atau 574,82Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,80Km<sup>2</sup>), dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur-Barat 35Km. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Padukuhan.

## 3. Topografi

Keadaan tanah wilayah Kabupaten Sleman dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara kondisinya relatif miring dan dibagian utara sekitar lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar ±100 sumber mata air, yang airnya mengalir ke sungai – sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol dan Krasak. Disamping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 s/d>1000m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ketinggian < 100 m; 100 – 499 m; 500 – 999 m; dan > 1000 m dari permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203Ha atau 10,79% dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah.

Wilayah dengan ketinggian 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246Ha atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan.

Wilayah dengan ketinggian 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538ha atau 11,38% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian > 1000 m dari



permukaan laut seluas 1.495Ha atau 2,60% dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

#### 4. Karakteristik Wilayah

- a. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu:
  - 1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya. Keberadaan Gunung Merapi merupakan asset wisata maupun sumber daya alam galian C, namun diperlukan antisipasi yang memadai untuk mengeliminir dampak lain negatif jika terjadi erupsi.
  - 2) Kawasan timur, meliputi Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Di wilayah ini terdapat banyak peninggalan purbakala (*candi*) yang merupakan pusat wisata budaya. Kondisi lahan kering, memiliki cadangan bahan batu putih yang cukup banyak.
  - 3) Kawasan tengah, yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
  - 4) Kawasan barat, meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah dengan irigasi yang baik dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu dan gerabah.
- b. Berdasar jalur lintas antar daerah, wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Sleman, Tempel dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah yang cepat



berkembang dan mengalami perubahan dari daerah pertanian menjadi wilayah industri, perdagangan dan jasa.

- c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
- 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati sebagai wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
  - 2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
  - 3) Wilayah fungsi khusus/wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.



Peta Wilayah Kabupaten Sleman



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sleman

## 5. Aparat Pemerintah

Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2009 sejumlah 13.506 Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kondisi sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

- a. Golongan I, 228 orang, Golongan II, 2.790 orang, Golongan III, 4.985 orang, Golongan IV, 5.503 orang.
- b. Jabatan Struktural yang terdiri dari, Esselon IIa, 1 orang, Esselon IIb: 26 orang, Esselon IIIa: 58 orang, Esselon IIIb: 83 orang, Esselon IVa: 452 orang, Esselon Ivb : 85 orang.



- c. Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
- 1) Jabatan fungsional umum sejumlah 3.597 orang
  - 2) Jabatan fungsional Khusus Apoteker 14 orang, Asisten Apoteker 37 orang, Auditor 29 orang, Bidan, 201 orang, Dokter Umum 77 orang, Dokter Gigi 37 orang, Dokter Spesialis 17 orang, Epidemiologi Kesehatan 13 orang, Fisioterapi 3 orang, Guru 7.242 orang, Instruktur Latihan Kerja 37 orang, Kepala Sekolah 595 orang, Nutrisionis 42 orang, Pamong Belajar 10 orang, Pengawas ketenagakerjaan 3 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 18 Orang, Pegawai Sekolah 62 orang, Penguji Kendaraan Bermotor 12 orang, Penilik 11 orang, Penyuluh Kehutanan 13 orang, Penyuluh Keluarga Berencana 62 orang, Penyuluh Kesehatan Masyarakat 9 orang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 6 orang, Penyuluh Pertanian 106 orang, Perantara Hubungan Industrial 4 orang, Perawat 299 orang, Perekam Medis 41 orang, Pranata Laboratorium Kesehatan 53 orang, Pustakawan 8 orang, Sanitarian 40 orang, dan Teknis Elektromedis 6 orang.
- d. Tingkat Pendidikan:SD 183 orang , SMP 379 orang, SMA 3.698 orang, D1 251 orang, D2 2.493 orang, D3 928 orang, Sarjana Muda 928 orang, D4 47 orang, S1 4.804 orang, S2 327 orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai program dan kegiatan antara lain dengan memberikan penghargaan, pelatihan, dan pemberian hukuman dan pembinaan.

- a. Pemberian penghargaan Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 598 orang
- b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
    - o Penyelenggaraan sendiri sejumlah 478 orang
    - o Pengiriman sejumlah 138 orang.
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 16 orang.
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa sebanyak 100 orang



- 4) Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi guru sebanyak 40 orang.
- 5) Calon Kepala Sekolah sebanyak 56 orang.
- 6) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan Fungsional
  - o Pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 439 orang
- c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 35 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 8 orang, pelanggaran disiplin pegawai tingkat sedang 3 orang dan pelanggaran disiplin tingkat berat 24 orang.
- d. Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.693 orang.
- e. Pada Tahun 2009 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman melaksanakan pengadaan CPNS sejumlah 426 orang yang terdiri dari CPNS tenaga honorer 59 dan pelamar umum 367 orang. Sedangkan untuk pengangkatan pegawai dari CPNS menjadi PNS sebanyak 593 orang.

## 6. Perekonomian

### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2009 sebesar Rp13.096.927 juta meningkat Rp1.641.856 juta atau (14,33%) dari tahun 2008 sebesar Rp11.455.071 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) pada tahun 2009 sebesar Rp6.102.888 juta meningkat Rp264.642 juta atau (4,53%) dari tahun 2008 sebesar Rp5.838.246 juta.

### b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah pada tahun 2009 sektor primer sebesar 17,77%, mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 16,86%, sektor sekunder sebesar 28,86%, mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 27,84%, dan sektor tersier 58,17% mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 55,28%.



Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian.

**c. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2009 sebesar Rp12.431.824,- meningkat Rp1.419.662,- atau (12,89%) dari tahun 2008 sebesar Rp11.012.162,- sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) sebesar Rp5.792.964,-. meningkat Rp180.453,- atau 3,21% dari tahun 2008 sebesar Rp5.612.511,-

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebesar 4,53%, pertumbuhan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 5,13%.

**e. Inflasi**

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebesar 4,10% mengalami penurunan jika dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2008 sebesar 10,34%.

Pada tahun 2008 inflasi tertinggi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 18,90% dan inflasi terendah pada kelompok pengeluaran kesehatan 4,75%. Pada tahun 2009 inflasi tertinggi pada kelompok sandang sebesar 11,22 dan inflasi terendah pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga sebesar -3,52%

**7. Bidang Keuangan Daerah dan Investasi**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga





pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemda untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih handal bagi Pemda dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2008 sebesar Rp958.684.636.957,43 menjadi Rp.996.351.421.460,84 Realisasi anggaran belanja tahun 2009 sebesar Rp1.016.042.827.292,37 sehingga terjadi defisit sebesar (Rp.19.691.405.831,53).

Realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan daerah sebesar Rp.213.739.051.142,59 dan pembiayaan dari sisi pengeluaran daerah sebesar Rp29.938.244.928,40.

Dari realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah Rp157.399.974.580,84 Realisasi dana transfer Rp717.703.169.280,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp121.248.277.600,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1.016.042.827.292,37.

## **8. Sosial Budaya**

### **a. Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang terregistrasi pada tahun 2009 sebanyak 1.102.765 jiwa yang terdiri dari 547.532 laki – laki (49,65%) dan 555.233 perempuan (50,35%) dengan rata-rata kepadatan sebesar 1.918 jiwa per km<sup>2</sup>. Dibanding tahun 2008, jumlah penduduk di Sleman



meningkat 1,14% yaitu dari 1.090.250 jiwa menjadi 1.102.765 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan jauh diatas angka rata-rata tersebut adalah Kecamatan Depok sebesar 3.621,69 jiwa, Mlati sebesar 3.372,02 jiwa, Gamping sebesar 3.217,39 jiwa, Godean sebesar 2.773,24 jiwa, Ngaglik sebesar 2.510,83 jiwa dan Berbah 2.158,20 jiwa. Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta. Wilayah di Kabupaten Sleman yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Cangkringan yakni sebesar 686,99 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Jenis Kelamin,  
Kepadatan dan Sex Rasio Tahun 2009**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan	Rasio Seks
			Laki – laki	Perempuan			
1	Moyudan	27,62	18.174	19.104	37.278	1349.67	105.11
2	Minggir	27,27	18.882	19.842	38.724	1.420.02	105,43
3	Seyegan	26,63	25.967	26.942	52.909	1.986.81	103,75
4	Godean	26,84	36.919	37.515	74.434	2.773.24	101,61
5	Gamping	29,25	45.589	46.171	91.760	3.217.39	101,27
6	Mlati	28,52	47.845	48.325	96.170	3.372.02	101,29
7	Depok	35,55	64.775	63.976	128.751	3.621.69	98,76
8	Berbah	22,99	24.555	25.062	49.617	2.158.20	102,06
9	Prambanan	41,35	32.320	29.844	62.164	1.503.36	92,34
10	Kalasan	35,84	34.810	35.343	70.153	1.957.39	101.53
11	Ngemplak	35,71	29.619	30.685	60.304	1.688.71	103,60
12	Ngaglik	38,52	48.192	48.525	96.717	2.510.83	100,69
13	Sleman	31,32	33.482	34.503	67.985	2.170.65	103,05
14	Tempel	32,49	32.300	33.332	66.632	2.050.85	103,19
15	Turi	43,09	19.506	20.086	39.592	918.82	102.97
16	Pakem	43,84	18.438	19.168	37.606	857.801	103,976
17	Cangkringan	47,99	16.159	16.810	32.969	686.99	104,03
	<b>Jumlah</b>	<b>574,82</b>	<b>547.532</b>	<b>555.233</b>	<b>1.102765</b>	<b>1.918.45</b>	<b>100.31</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil

Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh mutasi penduduk yang cukup dinamis. Pada tahun 2009 penduduk yang



lahir sebanyak 10.967 jiwa, penduduk yang mati sebanyak 4.806 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 17.840 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 11.507 jiwa, sehingga terjadi migrasi netto sebesar 6.333 jiwa.

#### b. Tenaga Kerja

Dilihat dari sumber mata pencaharian, penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar bergerak di sektor perdagangan sebanyak 26,36%, di sektor jasa sebanyak 24,90% dan di sektor pertanian sebanyak 20,31%. Penyerapan tenaga kerja terkecil berada di sektor listrik/gas/air yang hanya 0,30%. Dibanding dengan tahun sebelumnya peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 1,87% dan 1,59% di sektor jasa-jasa. Secara rinci gambaran mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

**Proporsi Penduduk Yang Bekerja Per Lapangan Usaha  
Kabupaten Sleman**

No.	Sektor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	28,60	21,61	22,19	18,44	20,31
2	Pertambangan & Penggalian	2,27	0,76	0,57	0,61	0,67
3	Industri	11,70	13,64	12,86	15,48	12,83
4	Listrik, Gas & Air	0,26	0,01	0,16	0,07	0,30
5	Bangunan	4,33	8,12	7,81	7,08	7,77
6	Perdagangan	21,83	22,88	25,99	27,07	26,36
7	Angkutan dan Komunikasi	4,05	4,87	2,94	4,25	3,42
8	Keuangan	4,27	2,51	3,34	3,75	3,43
9	Jasa-jasa	22,69	25,60	24,15	23,31	24,90
10	Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.



Dari jumlah penduduk yang ada, penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 mengalami penurunan, pada tahun 2008 sebesar 848.103 menjadi 828.029 pada tahun 2009.

#### Penduduk Usia Kerja

Tahun	Penduduk Usia Kerja				
	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
	Bekerja	Mencari Kerja	Jumlah		
2004	409.137	55.595	464.732	348.351	813.083
2005	477.718	46.435	524.153	300.543	824.696
2006	462.745	51.751	514.496	356.625	871.121
2007	505.672	42.473	548.145	270.701	818.846
2008	540.689	40.468	581.157	266.946	848.103
2009*	527.985	38.674	566.659	261.369	828.029

\* Data sementara dari BPS Kab. Sleman

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

#### c. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain: angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, rata-rata usia harapan hidup penduduk, dan status gizi masyarakat.

Angka kematian bayi (AKB) dapat dipertahankan dibawah 10 untuk setiap 1000 kelahiran hidup yaitu 5,97 pada tahun 2004 menjadi 4,08 tahun 2009, hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan AKB Propinsi DIY sebesar 19 perseribu kelahiran ataupun di tingkat nasional sebesar 34 perseribu kelahiran. Demikian pula dengan angka kematian ibu (AKI), dari tahun 2004 sebesar 78,89 menurun menjadi 69,31 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2009. Kondisi tersebut lebih baik jika dibanding AKI di tingkat propinsi sebesar 104 per seratus ribu kelahiran hidup maupun di tingkat nasional sebesar 228 per seratus ribu kelahiran.

Secara umum indikator tingkat kesehatan di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rata-rata usia harapan hidup sebesar 74,76 (72,60 tahun untuk



laki-laki dan 76,92 tahun untuk perempuan), lebih tinggi jika dibanding usia harapan hidup tingkat Propinsi DIY yaitu 74 tahun ataupun nasional sebesar 70,6 tahun.

Status gizi buruk pada tahun 2009 ditekan pada angka 0,53%. Kondisi tersebut lebih baik dari kondisi gizi buruk tingkat propinsi sebesar 0,69% maupun tingkat nasional sebesar 2,5% hasil riset kesehatan dasar. Demikian juga dengan angka gizi kurang sebesar 10,32% pada tahun 2009 lebih kecil angka propinsi sebesar 10,67% maupun angka nasional sebesar 20%.

## **B. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Kedudukan**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sleman dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

#### **a. Aspek Politik**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sleman dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat desa dapat dilihat dengan telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa). Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berlangsung dengan baik.

#### **b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah**

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil,



pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

## **2. Kewenangan dan Tugas Pokok**

### **a. Kewenangan**

Dengan dijadikannya Kabupaten Sleman sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang– Undang No.32 Tahun 2004 kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan wajib sebagaimana disebut diatas meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja serta lain-lain urusan seperti urusan pengembangan otonomi daerah, sosial, politik dalam negeri, olah raga, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, penerangan, pertambangan dan energi, kelautan dan pariwisata.

### **b. Tugas Pokok**

Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sleman yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.



### 3. Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan;
4. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam;
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal;
7. Dinas Pendidikan;
8. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Kesehatan;
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Badan Pengawasan Daerah;
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
15. Badan Pengendalian Pertanahan Daerah;
16. Badan Kepegawaian Daerah;
17. Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
19. Kantor Telekomunikasi dan Informasi;
20. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
21. Kantor Pengelolaan Pasar;
22. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
23. Balai Latihan Kerja;
24. Kecamatan;